

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Dampak**

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu seperti benda atau orang yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah proses pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka dapat membagi dampak kedalam 2 pengertian yaitu:

##### **1) Dampak Positif**

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah

suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokan fokus mental seseorang kepada yang negatif. Bila orang yang berfikir positif mengetahui bahwa dirinya sudah berfikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah kegiatan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

## 2) Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah kegiatan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## **2.2 Kemiskinan**

### 2.2.1 Definisi Kemiskinan

Definisi kemiskinan sangat beragam dan kompleks, secara *etimologi*, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak bertahta benda dan serba kekurangan. Pada dasarnya kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin.

Definisi yang ditemukan oleh Chambers (2006) memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi kemiskinan di masyarakat. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan Ilmu Sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu kondisi ketidakberdayaan juga terjadi sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum dalam masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri.

Departemen sosial dan biro statistik, mendefinisikan dari perspektif kebetulan dasar. Kemiskinan sebagai ketidak kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak. Menurut Nurhadi, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan.

Dimensi Kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu :

- 1) Kemiskinan *alamiah*, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian.
- 2) Kemiskinan *kultural*, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat.
- 3) Kemiskinan *struktural*, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial di sini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sering kali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh

struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Ketiga dimensi menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan tidak tunggal, bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperlihatkan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan disebabkan karena faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada kemiskinan secara kultural, bahkan bisa juga karena kondisi yang dibentuk oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti diperlihatkan dimensi kemiskinan struktural.

Kemiskinan yang dialami oleh petani di pedesaan selain karena rendahnya kualitas sumber daya manusia juga karena struktur dan kebijakan sektor pertanian yang kurang mengembangkan sektor pertanian. Kemiskinan struktural di wilayah pedesaan umumnya dialami oleh para petani yang tidak memiliki lahan atau buruh tani dan buruh penggarap dimana hasil pertaniannya tidak mencukupi untuk memberi makan dirinya dan keluarganya.

### 2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan (Cox 2004 ; 1-6), yaitu :

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang sering kali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
- 3) Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.
- 4) Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang

dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Kemiskinan merupakan kondisi *absolute* dan *relatif* yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural.

Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh sebagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenal dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.

### 2.2.3 Konsep Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi- Sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1) Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006 : 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95). Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok- kelompok swadaya, maupun lembaga- lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakkan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang



menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”. (Edi Suharto, 2009,138).

Kelemahan dari paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subjek dalam permasalahan kemiskinan. Hal ini menyebabkan kemiskinan yang timbul di masyarakat kurang mendapatkan perhatian.

## 2) Paradigma Demokrasi-Sosial

Pendekatan ini menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disinilah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini

dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

Kelemahan dari teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan intruksi untuk menanggulangi kemiskinan. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin.

### 3) Keberfungsian Sosial

Kedua pendekatan diatas memiliki kelemahan, oleh karenanya timbul pendekatan lainnya untuk menutupi kelemahan tersebut, yaitu pendekatan keberfungsian sosial. Pendekatan ketiga ini lebih mengarah pada pendekatan demokrasi sosial (Edi Suharto 2009). Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran- peran sosial dilingkungannya.

Pendekatan ini memandang kelompok miskin bukan sebagai objek yang pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Kelompok miskin bagi pendekatan ini adalah individu yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Keberfungsian sosial dapat

menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Melalui pendekatan ini dapat dijelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya.

Serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga, kekerabatan, dan jaringan sosial mempengaruhi kehidupan orang miskin. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa yang dimiliki si miskin dan bukan pada apa yang tidak dimiliki si miskin (Edi Suharto 2009).

Untuk mempelajari kemiskinan, sebaiknya dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. Pada poin pertama ini juga termasuk efektivitas jaringan sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya, dimana jaringan sosial yang dimaksud termasuk pula lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat.

Menggunakan indikator komposit untuk mengukur kemiskinan, dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial yang ada disekitarnya. Lebih menekankan pada konsep kemampuan sosial dari pada hanya pada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan. Kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan pada beberapa indikator kunci, yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan

(*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Sedangkan indikator kunci untuk mengukur jaringan sosial mencakup kemampuan lembaga- lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola aset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti kemiskinan, dan peran dalam menghadapi goncangan dan tekanan sosial.

Paradigma ini lebih lengkap dibandingkan dua paradigma sebelumnya karena selain menekankan pada institusi paradigma ini juga tidak melupakan kemampuan individu dalam mengatasi masalah kemiskinannya. Pada paradigma ini kelompok miskin tidak dianggap pasif namun dianggap memiliki kemampuan dan potensi dalam mengatasi kemiskinannya, dibantu dengan kemampuan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat. Gabungan kemampuan institusi dan individu ini akan membuat kajian mengenai kemiskinan yang dialami suatu kelompok menjadi lebih lengkap.

Berdasarkan tiga paradigma tersebut maka penelitian ini lebih menggunakan paradigma demokrasi-sosial. Hal ini dikarenakan melalui pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Alasan lainnya memilih pendekatan ini adalah bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) .

#### 2.2.4 Teori Menurut Ahli

Kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers (2006) memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Robert Chambers menegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah: Lilitan kemiskinan hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat.

Lazimnya kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal; kewajiban adat; musibah; ketidakmampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan. Dan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam usaha mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim dan lain-lain). Faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.

Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri

dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain kemiskinan merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia. Artinya, masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia dan masalah tersebut ada di semua negara walaupun dampak kemiskinan berbeda-beda.

Menurut Haughton dan Shahidur (1012:3) Kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

### **2.3 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok

yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Program Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa bentuk dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai : Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Program Bantuan Langsung Tunai juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Di samping itu masih banyak kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek. Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009:

- 1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- 2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a) bantuan langsung;
  - b) penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c) penguatan kelembagaan.

Jadi Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah agar dapat membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan

hidupnya. Seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat menyusul wabah covid-19. Penerapan pemenuhan sosial atau physical distancing sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau lockdown yang dilakukan di banyak negara di dunia telah menghancurkan perekonomian banyak Negara.

Di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilaporkan telah membuat sejumlah penduduk miskin meningkat. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha menengah pasar memutuskan pemutusan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat covid lebih daripada krisis ekonomi di tahun 1998.

Berbagai usaha dalam menangani kasus ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan Triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak covid, terutama masyarakat menengah kebawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terdiri dari dua kategori, yaitu program non reguler (4 program) dan program reguler (3 program).

Berikut adalah program-program, yang dapat diakses masyarakat, termasuk penyandang disabilitas :

- 1) Bantuan langsung tunai dana desa (program non reguler)

Dasar peraturan: Peraturan Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020. Syarat penerima bantuan ini :

- a) Terdaftar sebagai warga miskin melalui pendataan RT/RW di wilayah desa;
- b) Tidak terdaftar sebagai peserta dalam bansos berikut: Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Pra-kerja;
- c) Tidak memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis;
- d) Kehilangan mata pencaharian sebagai dampak covid-19;
- e) Jika tidak terdaftar sebagai penerima bansos dari pemerintahan pusat maupun daerah, namun juga tidak terdata dalam pendataan RT/RW, maka dapat mengkomunikasikannya dengan aparat atau perangkat desa;
- f) Jika calon penerima bantuan memenuhi syarat, namun tidak memiliki NIK atau KTP, maka tetap dapat menerima bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu dan alamat domidili di daerah tersebut sebagai pengganti

Bentuk bantuan ini berupa uang tunai dengan jumlah RP 600,000 dengan durasi waktu 3 bulan, dengan jumlah keluarga yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu 5,8 juta kepala keluarga.

2) Bantuan sosial tunai Dasar Peraturan:

Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan bantuan sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dengan syarat pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang dalam pendataan calon

peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial, dengan bentuk bantuan uang tunai dengan jumlah RP 600.000 perkepala keluarga dengan kuota pemerintah adalah 9 juta kepala keluarga..

3) Pembebasan biaya listrik Dasar Peraturan;

Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dengan syarat keluarga yang memiliki kapasitas listrik 450 KV dan warga pengguna berkapasitas 900 VA. Bentuk bantuan pada program ini yaitu pembebasan biaya dan pemotongan 50% dengan kuota pemerintah 24 juta pengguna.

4) Kartu pra kerja

Dasar Peraturan yaitu adalah Peraturan Presiden N0.36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu pra kerja, dengan syarat WNI berusia diatas 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan pra kerja yang terdampak covi-19, korban PHK (prioritas) bentuk bantuan : pelatihan dan insentif, besaran bantuan : Rp 1.000.000,-/pelatihan, insentif Rp 600.000,-/perbulan + insentif survei kekerjaan Rp 150.000. durasi waktu bantuan: insentif selama 4 bulan setelah selesai pelatihan dengan kuota 5,6 juta orang.

5) Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan (Program Reguler),

bantuan ini bersumber dari APBN dengan dasar peraturan Undang-Undang N0. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial.

- 6) Kartu sembako, sumber dana APBN dengan dasar peraturan yaitu peraturan presiden NO. 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial bantuan non tunai.

### **2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

Pertama, penelitian dari Agus Tri Anggoro (2010) dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan Daerah Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu peran Pemerintah kelurahan dalam penyaluran BLT dinilai sudah cukup baik, akan tetapi dalam beberapa hal masih adanya beberapa hambatan dalam aspek sosialisasi mengenai keberlanjutan program BLT yang dipertanyakan masyarakat. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara memaksimalkan pertemuan lokal yang baik, juga sebagai penampung aspirasi untuk disalurkan ke jajaran organisasi pelaksanaan yang berwenang.

Kedua, penelitian dari Marini (2012) dengan judul Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 75 responden yang mendapatkan BLT ini nyatanya hanya 21 responden yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan. Dan 54 responden yang lain tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Manfaat dari adanya BLT ini untuk masyarakat yaitu masyarakat miskin merasa bahwa

pemerintah menghargai mereka dan dengan adanya BLT ini dapat membuat mereka menjadi malas dan dapat menjadi masalah dalam masyarakat.

Ketiga, penelitian dari Andi Rahmat Nizar Hidayat (2021) dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah sudah berperan baik dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut. Pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi mengenai Bantuan Langsung Tunai sehingga masyarakat dapat mengetahui apa itu BLT dan syarat menjadi penerima BLT.

#### **2.4 Alur Pikir Penelitian**

Alur pikir penelitian merupakan proses yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan, teori yang digunakan untuk memahami permasalahan dan kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari tujuan yang ingin diteliti yang selanjutnya dapat memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian. Secara sistematis alur pikir penelitian ini dampak penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Dengan identifikasi masalahnya yaitu pertama rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di Desa Retok, kedua bantuan yang diberikan tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, ketiga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Langsung Tunai, dan keempat ketergantungan masyarakat tentang adanya Bantuan dari Pemerintah.

Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori dari Chambers dalam Nasikun (2001). Dan kemudian hasil dari penelitian ini adalah terealisasikannya Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

**Bagan 2.1**

